

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
دinas Penanaman Modal dan PTSP



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. Sukapura III – Komplek Perkantoran Pemda Kab. Tasikmalaya 46415
Telp/Fax. (0265) 2553101 email : dpmptsp2tasikmalayakab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 000.7.26/Kep.021/DPMPTSPTK/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi, maka dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LKIP Tahun 2025;
 - b. melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan LKIP Tahun 2025;
 - c. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya guna evaluasi terhadap penyusunan LKIP Tahun 2025;
- KETIGA : Bahwa Pegawai yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada Tanggal : 15 Januari 2025



KEPALA DINAS,

dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP. 19710409 200212 1 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas

Nomor : 000.7.26/Kep.021/DPMPTSPTK/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025**

1. Ketua : Kepala Dinas
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas
3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Penanaman Modal;
 2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perijinan;
 3. Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 4. Kepala Sub Bag Keuangan;
 5. Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 6. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan



KEPALA DINAS,

dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si

NIP. 19710409 200212 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./ Faks (0265) 2553101
Website : dpmptsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmptsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

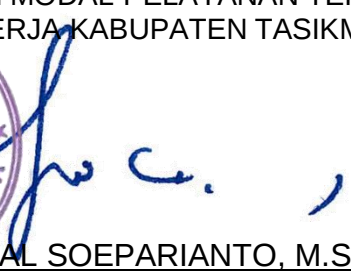
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Reviu dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun secara akurat dan valid.

Tasikmalaya, Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA




Dr. Hik Faisal Soeparianto, M.Si
NIP.19710409 200212 1 005

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.

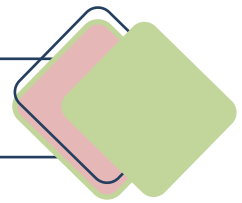
Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini, diharapkan adanya peningkatan efisiensi, efektivitas kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga dapat mewujudkan *Good Governance*.



Tasikmalaya, Januari 2026
KEPALA DINAS

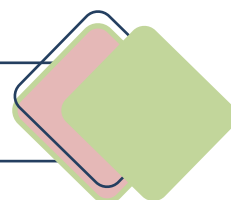
dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP. 19710409 200212 1 005

DAFTAR ISI



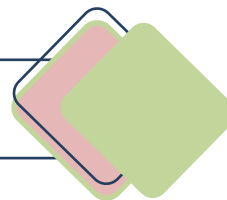
	Halaman
1. Kata Pengantar.....	i
2. Daftar Isi.....	ii
3. Daftar Tabel	iii
4. Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	I-2
B. Struktur Organisasi.....	I-3
C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	I-6
D. Isu Aktual.....	I-8
E. Sistematika Penyusunan	I-9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Perjanjian Kinerja	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	III-1
B. Realisasi Anggaran	III15
BAB IV PENUTUP.....	IV-1
Lampiran	

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	I-1
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana	I-6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja	II-3
Tabel 2.2	Sasaran Program Renja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	II-4
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	II-6
Tabel 2.4	Sasaran dan Target IKU DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	II-7
Tabel 3.1	Capaian Reformasi Birokrasi DPMPTSPTK Tahun 2025.....	III-1
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 IKM Terhadap Pelayanan Perijinan	III-4
Tabel 3.3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan.....	III-5
Tabel 3.4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak	III-6
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Sasaran Strategis DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	III-8
Tabel 3.6	Efisiensi Anggaran DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.....	III-8

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.....	I-5
Gambar 2.1	Diagram Alokasi Anggaran Bidang pada DPMPTSPTK Tahun 2025.....	II-5

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah Akuntabilitas, dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat/Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja DPMPTSPTK Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah.

Penyusunan laporan kinerja DPMPTSPTK Tahun 2025 berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tasikmalaya No.113 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses penyusunan LKIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan Pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah

dicapai dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang.

A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Kedudukan

- 1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.
- 2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Adapun fungsi DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Tasikmalaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

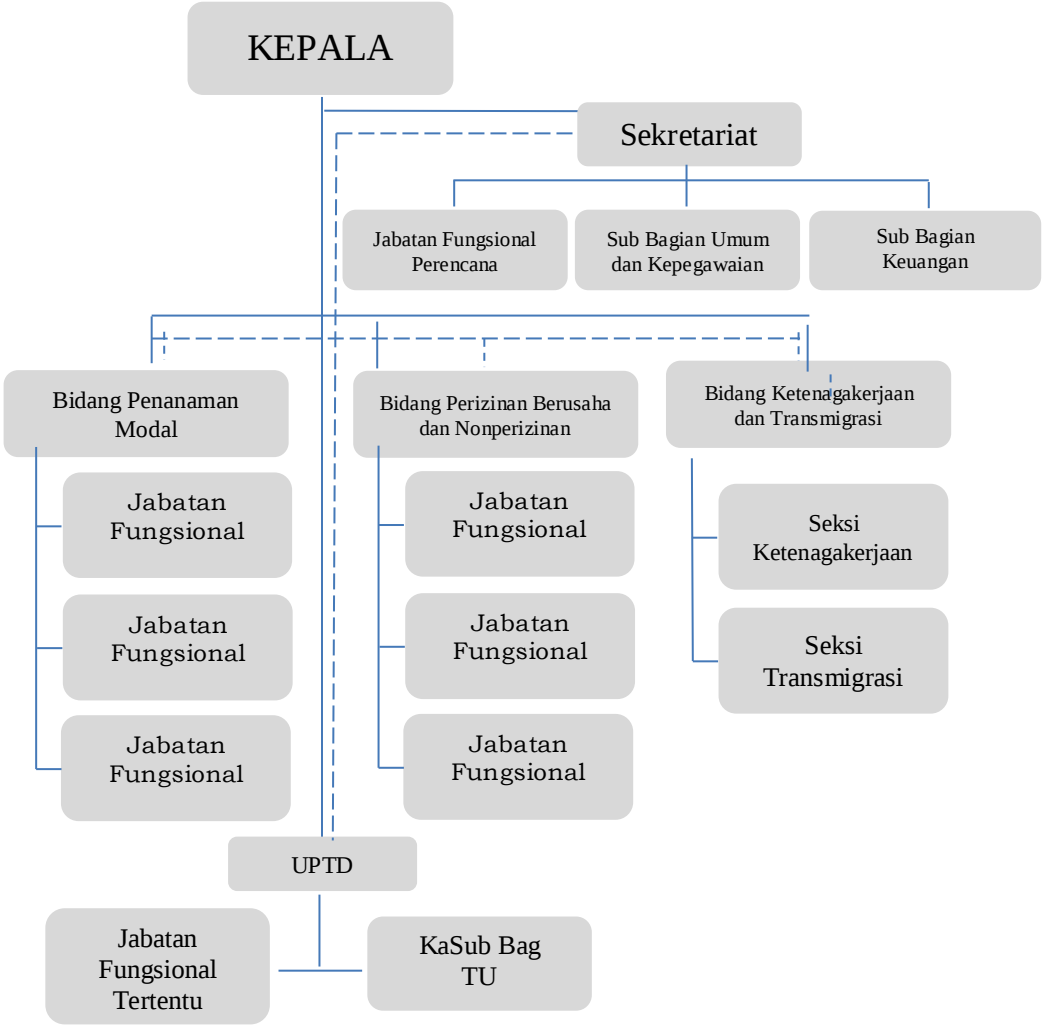
B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terrpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan

- c. Jafung Perencana Ahli Muda
- 3. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas:
 - a. Jafung Penanaman Modal
 - b. Jafung Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - c. Jafung Pengendalian Penanaman Modal
- 4. Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, terdiri atas:
 - a. Jafung Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
 - b. Jafung Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
 - c. Jafung Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan
- 5. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Ketenagakerjaan
 - b. Seksi Transmigrasi
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

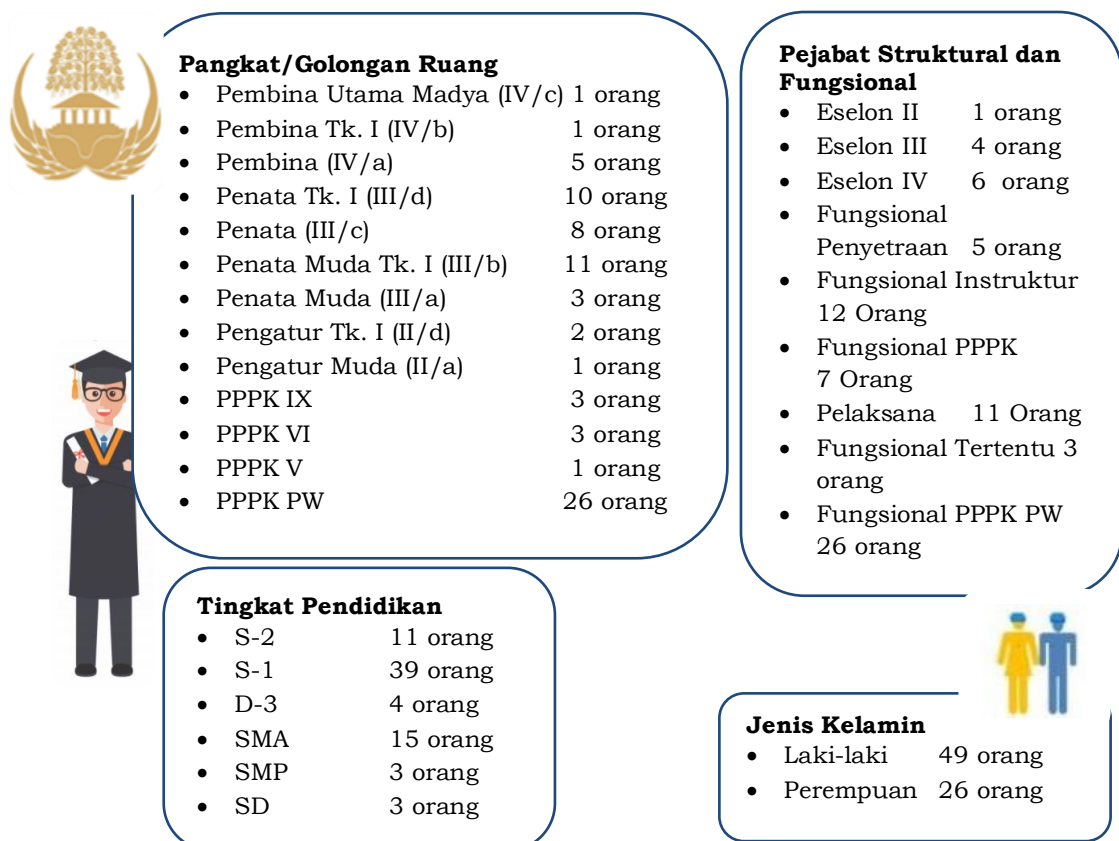
Gambar 1.1
Struktur Organisasi DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya



C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material maupun metode. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia periode tahun 2025 sebanyak 75 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK dan PPPK PW dengan keadaan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya ditunjang dengan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Gedung Kantor	1.447 M ²	
	Ruang Kepala	1 unit	
	Ruang Rapat Pimpinan	1 unit	
	Aula	1 unit	
	Ruang Sekretaris	1 unit	
	Ruang Kasubag	3 unit	
	Ruang Kepala Bidang	3 unit	
	Ruang Kepala Seksi	7 unit	
	Ruang Pelayanan (front office)	1 unit	
	Ruang Pengolahan (back office)	1 unit	
	Ruang Penerbitan	1 unit	
	Ruang Arsip	1 unit	
	Ruang Tunggu	1 unit	
	Loket Pembayaran	1 unit	
	Loket Informasi & Pengaduan	1 unit	
	Ruang Rokok	1 unit	
	Ruang Laktasi	1 unit	
	Ruang Satpam	1 unit	
	Ruang Serbaguna	2 unit	
	Ruang Baca dan Bermain Anak	1 unit	
	Musholla	1 unit	
	Pantry	1 unit	
	Kamar Mandi/WC	6 unit	
2.	Kendaraan Roda 4	9 unit	
3.	Kendaraan Roda 2	17 unit	
4.	Komputer/PC	31 unit	
5.	Laptop	13 unit	
6.	Printer	26 unit	
7.	Server	2 unit	
8.	Telephone	1 unit	
9.	Faximili	1 unit	
10.	Infocus	2 unit	
11.	Layar Infocus	2 unit	
12.	Internet		
	Jaringan Speedy 100 Mbs	1 paket	
13.	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan :		
	E-mail dpmpptsptk@tasikmalayakab.go.id	1 paket	
	Local Area Network Sistem	1 paket	

No.	Uraian	Jumlah	Ket
	Informasi Manajemen Perizinan (SIM Perizinan)		
14.	Tablet	7 unit	
15.	Mesin Penghancur Kertas	2 unit	
16.	Scanner	2 unit	
17.	Digital Kamera	1 unit	
18.	Televisi	1 unit	
19.	USB Adapter	5 unit	
20.	Handphone	1 unit	
21.	Standing Bracket	1 unit	
22.	CCTV	1 set	
23.	Pendingin Ruangan	15 unit	
24.	Tabung Pemadam Kebakaran	2 unit	
25.	Kursi Tunggu Tamu	2 set	
26.	Kursi Sofa	5 set	
27.	Meja Kerja	28 unit	
28.	Meja Pelayanan	1 set	
29.	Kursi Kerja	169 unit	
30.	Lemari Kayu	6 buah	
31.	Lemari Besi	9 buah	
32.	Rak Arsip	21 buah	
33.	Brankas	1 buah	
34.	Perosotan Anak	1 buah	
35.	Kursi Sofa Baca	2 buah	
36.	Rak Buku Minimalis	1 buah	
37.	Meja Popok Laktasi	1 buah	
38.	Lemari Es Laktasi	1 buah	

D. Isu Aktual

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Memperkuat kontribusi penanaman Modal terhadap pertumbuhan perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global.

- c. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah dan pengembangan kemitraan penanaman modal dengan sektor UKM untuk meningkatkan daya saing penanaman modal.
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan khususnya melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta tata kelola organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja.
- e. Optimalisasi Pelayanan UPTD Balai Latihan Kerja melalui penyediaan sarana dan prasana pelatihan dalam hal peningkatan kompetensi calon tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- f. Peningkatan Kualitas SDM Transmigran

E. Sistematika Penyusunan

Penulisan Laporan Kinerja DPMPSTPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Pendahuluan berisi :

- A. Kedudukan tugas pokok dan fungsi
- B. Struktur organisasi
- C. Aspek kepegawaian dan sarana prasarana

D. Isu aktual

E. Sistematika penyusunan

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

A. Rencana Strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 telah disusun arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh di bidang agribisnis dan pariwisata adalah dengan meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis keunggulan agribisnis dan pariwisata.

Arah kebijakan tersebut menjadi dasar bagi DPMPTSPK kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian visi Bupati Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu : ***“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”***.

Untuk mewujudkan pernyataan visi sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan misi Kabupaten Tasikmalaya, dan yang terkait dengan DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya adalah misi ke-4, yaitu: ***“Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global.”***.

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran untuk mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya sebagai tujuan investasi.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya yaitu *Meningkatkan daya saing daerah dalam menunjang kemudahan berusaha*.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, terdapat 5 sasaran strategis DPMPTSPTK yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
3. Meningkatnya Kesempatan Kerja;
4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja;
5. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya per tahun dengan menggunakan SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategis organisasi).

IKU tersebut seluruhnya bersifat outcome yang sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal. Penetapan target yang ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh pejabat struktural di lingkungan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya. IKU DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
Indikator Sasaran: Nilai Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
Indikator Sasaran: Nilai realisasi penanaman modal
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan
4. Meningkatnya Kesempatan Kerja;
Indikator Sasaran: Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan
5. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja;
Indikator Sasaran: Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran.

Perjanjian Kinerja dan Perubahan Renja DPMPSTPTK Kabupaten Tasikmalaya secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja DPMTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui			
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	228.279 Juta
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	89,02 Skor
3.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	50,15 %
4.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	15,41 %
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	76,80 Skor

No	Program	Aggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	8.411.317.774	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	47.400.000	
3	Program Promosi Penanaman Modal	1.000.000.000	
4	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	990.000.000	
5	Program Penempatan Tenaga Kerja	100.000.000	
6	Program Hubungan Industrial	175.000.000	
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	25.000.000	
	Jumlah	10.748.717.774	

Perubahan Perjanjian Kinerja DPMTSPTK Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui			
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	228.279 Juta
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	89,02 Skor
3.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	50,15 %
4.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	15,41 %
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	76,80 Skor

No	Program	Aggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	8.692.865.774	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	227.400.000	
3	Program Promosi Penanaman Modal	100.000.000	
4	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.455.724.633	
5	Program Penempatan Tenaga Kerja	213.649.000	
6	Program Hubungan Industrial	175.000.000	
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	20.000.000	
	Jumlah	10.557.239.407	

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kinerja DPMPTSPK tahun 2025 diukur dengan membandingkan antara target setiap indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar.

1. Nilai Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan pada tahun 2026, hasil capaian Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSPK pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar berikut :



Perbandingan dengan tahun sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
61,79	76,37	15,05	14,58
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
102,13%	102,60%	22,91%	0,47

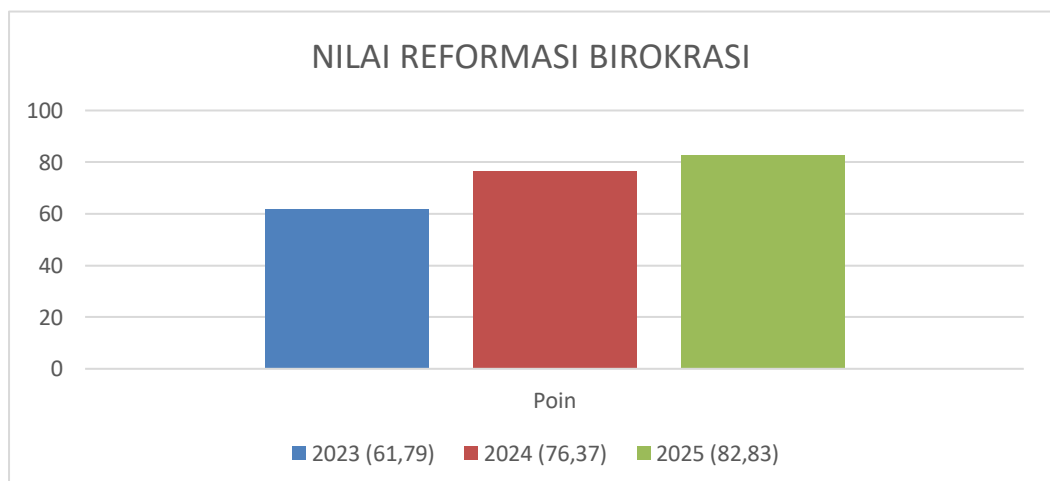
Perbandingan dengan target Renstra	
Target Renstra	Capain terhadap Renstra
76,80	107,85

Perbandingan dengan target Nasional/ Provinsi	
Target Renstra	Nasional/ Provinsi
76,80	Tidak ada

Tabel diatas menunjukkan bahwa target nilai reformasi birokrasi Tahun 2025 sebesar 76,80 poin sedangkan realisasi nilai reformasi birokrasi sebesar 82,83 poin mengalami kenaikan sebesar 6,03 poin dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebesar 76,37 poin. Sehingga rata-rata capaian kinerja reformasi birokrasi DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 mencapai 107,85%. Dibandingkan dengan tahun 2024 nilai realisasi reformasi birokrasi mengalami kenaikan sebesar 6,46%.

Sementara dari aspek perencanaan lima tahunan RENSTRA Perangkat Daerah, capaian kinerja tahun 2025 terealisasi sebesar 82,83 poin dari target RENSTRA sebesar 76,80 poin capaian melampaui target lebih tinggi 6,03 poin. Capaian nilai reformasi birokrasi DPMPTSPK dari tahun ke tahun semakin meningkat tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami progress yang cukup signifikan di tahun 2023 sebesar 61,79 poin, tahun 2024 sebesar 76,37 poin dan untuk tahun 2025 sebesar 82,83 poin.

Tren Peningkatan Realisasi RB



Kalau di ukur dari keberhasilan DPMTSPTK Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai target nilai reformasi birokrasi tahun 2025 ada beberapa faktor yang mendorong keberhasilan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap regulasi dan pedoman RB terbaru.
2. Terjalannya Kerjasama, komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan pelayanan publik.
3. Penguatan sistem dan manajemen SDM aparatur dalam melakukan evaluasi penilaian mandiri dari masing-masing bidang.
4. Kelengkapan dokumen yang lengkap dan kualitas eviden penilaian

Upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan yaitu dengan menyusun rencana aksi dan road map reformasi birokrasi, mengintergrasikan antara rencana aksi dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, memberikan target kinerja yang terukur, melakukan evaluasi rutin terhadap target kinerja Perangkat Daerah.

Program yang mendukung pencapaian nilai reformasi birokrasi yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas 6,32% atau setara dengan Rp. 8.365.465.774,- dan terelaborasi sebesar Rp. 7.836.913.836,- (93,68%) dari pagu anggaran keseluruhan DPMTSPTK sebesar Rp. 10.557.239.407,-

2.

Nilai realisasi penanaman modal

Nilai Realiasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut :

Efisiensi Anggaran 0,95%
Rp. 100.000.000,-

Capaian 2025
190,07%

Target	Realisasi
288.279 (juta)	547.935 (juta)

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
446.296 (Juta)	517.355 (Juta)	234.743 (juta)	71.059 (juta)
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
286,43%	319,27%	21,99%	32,84%

Perbandingan dengan target Renstra

Target Renstra	Capain terhadap Renstra
288.279 (juta)	190,07%

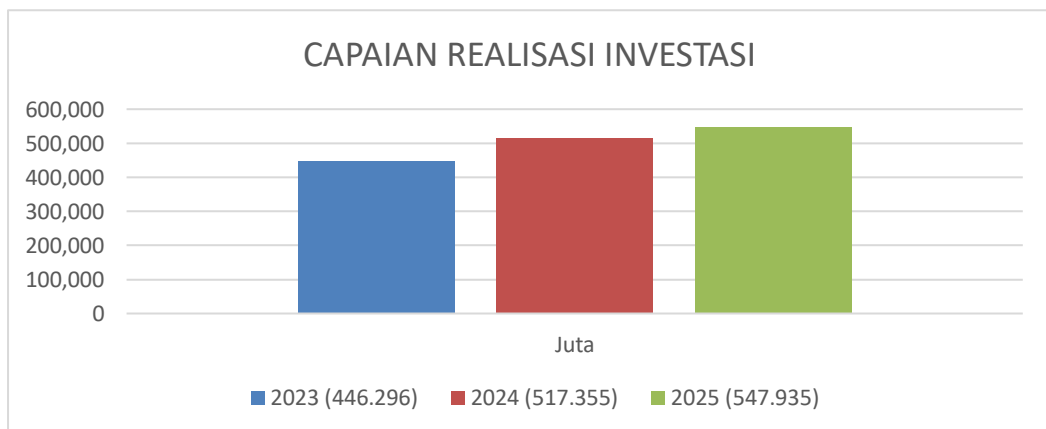
Perbandingan dengan target Nasional/ Provinsi

Target Renstra	Nasional/ Provinsi
288.279 (juta)	Tidak ada

Dari tabel diatas capaian sasaran realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tercapai melebihi target yaitu sebesar Rp. 547.935.572.128,- dari target Rp. 288.279.000.000,- dengan capaian kinerja sebesar 190,07%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasai dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebesar Rp. 517.355.206.276,- dengan capaian kinerja mencapai 319,27%. Sehingga rata-rata capaian sasaran realisasi investasi di

Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan dari Tahun 2024 sebesar 30.580.365.851,- atau sebesar 5,19% pada tahun 2025.

Sementara dari aspek perencanaan lima tahunan RENSTRA Perangkat Daerah, capaian kinerja tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 547.935.572.128,- dari target RENSTRA dan Perjanjian Kinerja sebesar Rp. 288.279.000.000,- capaian melampaui target. Capaian sasaran realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya dari tahun ke tahun semakin meningkat tahun 2023 sampai dengan 2025 mengalami progress yang cukup signifikan di tahun 2023 sebesar Rp. 446.296.142.757,-, tahun 2024 sebesar Rp. 517.355.206.276,- dan untuk tahun 2025 sebesar Rp. 547.935.572.128,-. Realisasi investasi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 mencapai 190,07%.



Tren Capaian Sasaran Realisasi Investasi

Adapun beberapa faktor yang harus di tingkatkan lagi diantaranya lain masih banyak para pelaku usaha baik UMK ataupun Non UMK yang memiliki NIB tidak melaporkan kegiatan penanaman modalnya setiap periode pelaporan dan pelaku usaha yang melaporkan realisasi investasi namun perlu perbaikan banyak yang masih belum memperbaiki sampai masa periode pelaporan ditutup.

Kalau di ukur dari keberhasilan peningkatan realisasi investasi, nilai realiasiasi Penanaman Modal sampai dengan triwulan IV tahun 2024 berdasarkan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui DPMPTSP Provinsi Jawa Barat adalah Rp. 547.935.572.128,- . 1.387 LPKM yang diantaranya 75 Penanam Modal Asing sebesar Rp. 8.305.352.418,- dan 1.312 Penanam Modal Dalam Negeri sebesar. Rp. 539.630.219.710.-.

Upaya yang dilakukan oleh DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya dengan adanya kegiatan Promosi Penanaman Modal dapat menjadi salah satu penyebab keberhasilan dalam pencapaian target realisasi, hal tersebut dikarenakan melalui kegiatan Promosi Penanaman Modal dapat memperkenalkan potensi daerah Kabupaten Tasikmalaya kepada calon investor. Selain kegiatan tersebut, kegiatan lain yaitu Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat memberikan informasi kepada para investor untuk melaporkan LKPM sehingga realisasi investor di Kabupaten Tasikmalaya tercatat di BKPM.

Program yang mendukung sasaran pencapaian nilai realisasi investasi yaitu Program Promosi Penanaman Modal. Adapun efesinesi anggaran capaian sasaran strategis di atas 0% atau setara dengan Rp. 100.000.000,- dan terelasasi sebesar Rp. 100.000.000,- (100%) dari pagu anggaran keseluruhan DPMPTSPTK sebesar Rp. 10.557.239.407,-

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan

DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga diperoleh indeks kepuasan masyarakat yang menjadi indikator penilaian kualitas perizinan di Kabupaten Tasikmalaya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

DPMPTSPK telah melaksanakan SKM secara online dengan memperhatikan 9 unsur yang terdiri dari persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Alamat website SKM Online Kabupaten Tasikmalaya adalah <http://skm.tasikmalayakab.go.id>.

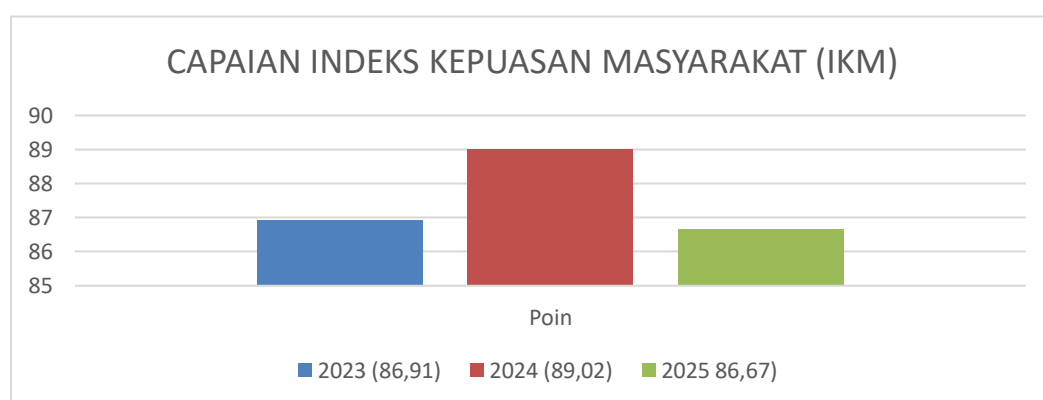


Perbandingan dengan tahun sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
86,91	89,02	-1,61	2,11
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100%	103,27%	-3,17%	3,27%

Perbandingan dengan target Renstra	
Target Renstra	Capain terhadap Renstra
89,02	97.36%

Perbandingan dengan target Nasional/ Provinsi	
Target Renstra	Nasional/ Provinsi
89,02	Tidak ada

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perijinan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 sebesar 86,67 (baik) dari target 89,02 dengan capaian kinerja sebesar 97,36%. Meskipun nilai SKM menurun namun kinerja masih tergolong baik jika dibandingkan tahun 2024 dengan besaran 89,02.



Tren Capaian Peningkatan IKM Pelayanan Perizinan

Penurunan kinerja IKM pelayanan perizinan ini disebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Meningkatnya jumlah permohonan izin yang tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM dan sistem pendukung yang memadai.
2. Meningkatnya beban kerja pegawai, sehingga fokus dan kualitas interaksi dengan masyarakat menjadi berkurang.
3. Informasi persyaratan dan alur perizinan yang kurang jelas atau belum diperbarui secara optimal, baik di website maupun di ruang pelayanan.
4. Sistem aplikasi yang sering maintenance jadi otomatis menghambat pelayan perizinan.

Hal yang diupayakan oleh DPMPSTPTK peningkatan unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Yaitu evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan, melalui peningkatan kompetensi SDM, perbaikan SOP, optimalisasi layanan digital, serta peningkatan sarana prasarana guna mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematis dan proses pelayanan sesuai SOP serta pengelolaan pengaduan harus lebih baik. Dengan adanya respons positif dari masyarakat yang merasakan kebijakannya dengan ikut serta dalam survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan serta terus berupaya meningkatkan layanan perizinan dan konsultasi/ informasi perizinan baik secara online maupun offline. Kami juga menyediakan layanan Call Center yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah perizinan.

Program yang mendukung sasaran pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tentang pelayanan perizinan yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal. Adapun efisiensi

anggaran capaian sasaran strategis di atas 1,15% atau setara dengan Rp. 227.400.000,- dan terelisasi sebesar Rp. 224.790.418,- (98,85%) dari pagu anggaran keseluruhan DPMPTSPK sebesar Rp. 10.557.239.407,-.

4. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke dunia usaha dan dunia industri. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelayanan ketenagakerjaan, khususnya dalam mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan secara tepat, cepat, dan sesuai kompetensi. Semakin tinggi persentase tenaga kerja yang ditempatkan, maka semakin baik kinerja pelayanan penempatan tenaga kerja, yang berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya kesempatan kerja, serta terwujudnya keseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja di daerah.

Berdasarkan hasil penghitungan rumus persentase tenaga kerja yang di tempatkan di bagi dengan jumlah kerja yang terdaftar di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Efisiensi Anggaran 15,81%
Rp. 1.864.373.633,-

Capaian 2024
102,49%

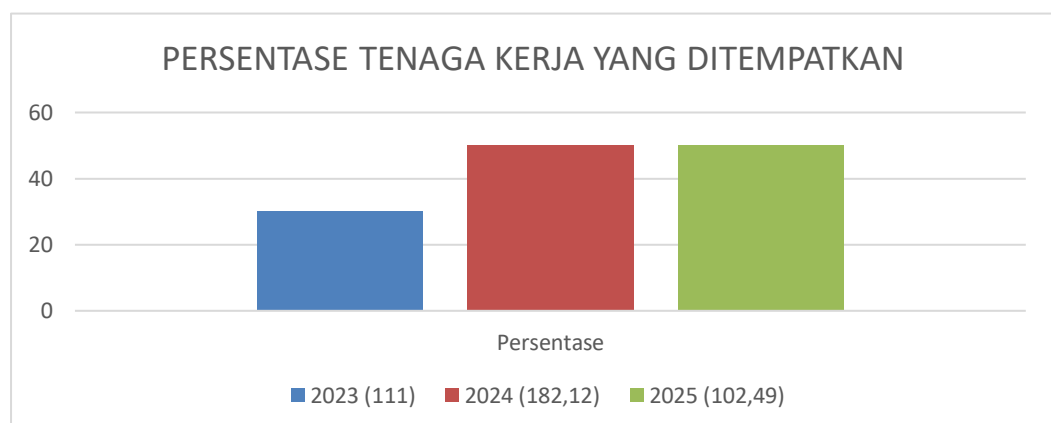
Target	Realisasi
50,15 (persen)	51,40 (persen)

Perbandingan dengan tahun sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
30,05	50,12	0,06	20,07
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
111%	182,12%	1%	71,12%

Perbandingan dengan target Renstra	
Target Renstra	Capain terhadap Renstra
50,15%	102,49%

Perbandingan dengan target Nasional/ Provinsi	
Target Renstra	Nasional/ Provinsi
50,15%	Tidak ada

Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan pada tahun 2025 sebesar 51,40% dari target 50,15% dengan capaian kinerja sebesar 102,49%. Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan pada tahun 2025 tercapai yaitu sebanyak 3.824 orang. Sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar melalui Ak-1 pada tahun 2025 sebanyak 7.441 orang. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasai dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebesar Rp. 50,12%.



Tren Capaian Tenaga Kerja yang ditempatkan

Capaian kinerja mencapai 102,49% meningkat 1,37%. Sehingga rata-rata capaian sasaran persentase tenaga kerja yang ditempatkan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan yaitu sebesar 111% dari Tahun 2024 sebesar 128% menjadi 102,49% pada tahun 2025.

Kalau di ukur dari keberhasilan DPMPSTPTK Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai target sasaran persentase tenaga kerja yang ditempatkan tahun 2025 ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan sebagai berikut :

1. Adanya komunikasi yang terbuka dan efektif tentang kesempatan lowongan pekerjaan antara pemerintah daerah dan Lembaga/ perusahaan.
2. Banyak pekerja berkompotensi yang sudah terlatih dan siap kerja yang sudah dilatih di BLK.
3. Adanya job fair yang dilakukan dinas DPMPSTPTK untuk mencari pencari kerja Latar belakang pendidikan yang relevan dan pengalaman kerja.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan yaitu dengan melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi melalui sistem pelatihan Mobile Training Unit Harian (MATUH), Peningkatan kesempatan kerja melalui fasilitas bursa kerja dan padat karya.

Program yang mendukung pencapaian persentase tenaga kerja yang ditempatkan yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja. Adapun efesinesi anggaran capaian sasaran strategis di atas 8,36% atau setara dengan Rp. 1.864.373.633,-dan terelasi sebesar Rp. 1.708.565.189,- (91,64%) dari pagu anggaran keseluruhan DPMPSTPTK sebesar Rp. 10.557.239.407,-

5. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak menunjukkan tingkat kepatuhan dunia usaha terhadap prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang adil, aman, dan berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana perusahaan telah memenuhi standar ketenagakerjaan, seperti pemenuhan hak dan kewajiban pekerja, penerapan upah sesuai ketentuan, penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Semakin tinggi persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, maka semakin baik pula iklim ketenagakerjaan di daerah, yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas perusahaan, serta daya saing investasi.

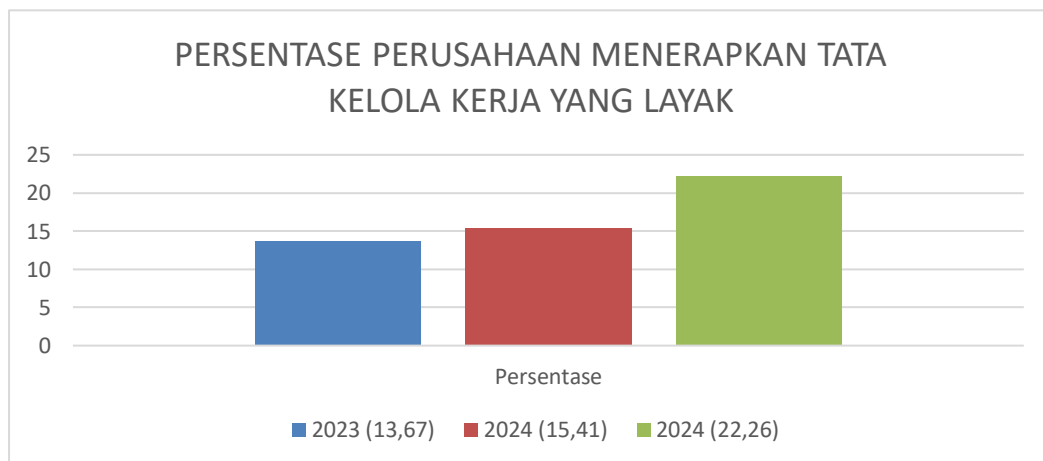
Berdasarkan hasil penghitungan rumus persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak di bagi dengan jumlah perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :



Perbandingan dengan tahun sebelumnya			
Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
13,67	15,42%	0,85	2
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
325%	284,32%	-16,86	41

Perbandingan dengan target Renstra	
Target Renstra	Capain terhadap Renstra
15,41%	144,45
Perbandingan dengan target Nasional/ Provinsi	
Target Renstra	Nasional/ Provinsi
15,41%	Tidak ada

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2025 sebesar 22,26% dari target 15,41% dengan capaian kinerja sebesar 144,45% terjadi peningkatan Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2024. Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2025 sebanyak 58 perusahaan dari jumlah keseluruhan perusahaan sebanyak 266 perusahaan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat peningkatan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dari 40 perusahaan di tahun 2025 ada peningkatan sebesar 5,85%.



Tren Capaian Sasaran Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak

Upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan yaitu dengan melaksanakan Pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan, memfasilitasi Pengusaha dalam memenuhi kewajiban membuat peraturan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengusaha sudah memahami proses dan alur pembuatan peraturan perusahaan untuk dipedomani perusahaan.

Program yang mendukung pencapaian persentase tenaga kerja yang ditempatkan yaitu Program Hubungan Industrial. Adapun efesinesi anggaran capaian sasaran strategis di atas 0,06% atau setara dengan Rp. 175.000.000,- dan terelaborasi sebesar Rp. 174.895.000,- (99,94%) dari pagu anggaran keseluruhan DPMPTSPK sebesar Rp. 10.557.239.407,-

B. Realisasi Anggaran

DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 3 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang penanaman modal dan urusan pemerintah bidang Tenaga Kerja Serta Urusan Transmigrasi. Pada Tahun Anggaran 2025 DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan 7 (tujuh) program, 11 (sebelas) kegiatan, 21 (dua puluh satu) sub kegiatan.

Anggaran DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebesar Rp. 10.557.239.407,- dengan rincian sebagai berikut : (Rp. 10.014.797.007,- bersumber dari APBD Kabupaten dan Rp. 542.442.400,- bersumber dari DBHCHT) dengan realisasi Rp. 9.865.269.443,- (93,45%) yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 10.360.717.407,- dengan realisasi Rp. 9.672.982.445,- (93,36%) yang terdiri atas :
 - Belanja Pegawai : Rp. 6.267.218.846,- dengan realisasi Rp. 5.847.565.854,- (93,30%)
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.053.498.561,- dengan realisasi Rp. 3.825.416.591,- (94,37%)
2. Belanja Modal Rp. 196.522.000,- dengan realisasi Rp. 192.286.998,- (97,84%)

Realisasi anggaran per sasaran strategis pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis
DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa (Rp)	%	Efisiensi %
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	107,85 %	8.365.465.774	7.836.913.836	528.551.938	93,67	6,37
Meningkatnya realisasi penanaman modal	240,03 %	100.000.000	100.000.000	0	100	0
Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan	97,36 %	227.400.000	224.790.418	2.609.582	98,85	1,15
Meningkatnya Kesempatan Kerja	102,50 %	1.864.373.633	1.708.565.189	115.808.444	91,64	8,36
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	144,45 %	213.649.000	178.292.508	35.356.492	81,11	18,89

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya nilai reformasi birokrasi perangkat daerah” tercapai melalui kinerja “nilai reformasi birokrasi” sebesar 107,85% dan efisiensi anggaran sebesar 6,87%

2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya realisasi penanaman modal” tercapai melalui kinerja “nilai realisasi investasi” sebesar 240,03% dan efisiensi anggaran sebesar 0%
3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan” tercapai melalui kinerja “Persentase survei kepuasan masyarakat (SKM)” sebesar 97,36% dan efisiensi anggaran sebesar 1,15%
4. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kesempatan kerja” tercapai melalui kinerja “Persentase tenaga kerja yang ditempatkan” sebesar 102,50% dan efisiensi anggaran sebesar 8,36%
5. Kinerja Sasaran “Meningkatnya perlindungan tenaga kerja” tercapai yang diperoleh melalui kinerja “Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak” sebesar 144,45% dan efisiensi anggaran sebesar 81,89%

Tabel 3.6
Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Tahun 2025

No	Kebijakan (Renstra/Renja)	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Tahun 2025
			Rencana	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.557.239.407	9.865.269.443	93,45%		
1	Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.365.465.774	7.831.913.836	93,62%	
		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	68.734.500	98,19%	Output : Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 9 dokumen Outcome : Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	48.922.500	97,85%	Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 3 dokumen Outcome : Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu

		1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.812.000	99,06%	Output : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 6 dokumen Outcome : Persentase dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Output : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 6 dokumen Outcome : Persentase dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu
		1.2	Administrasi Keuangan Daerah	6.267.218.846	5.847.565.854	93,30%	Output : Terselenggaranya layanan administrasi keuangan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Terselenggaranya layanan administrasi keuangan Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.267.218.846	5.847.565.854	93,30%	Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 840 orang Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 840 orang Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.018.000	442.618.706	92,59%	Output : Terselenggaranya layanan administrasi perangkat daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Terselenggaranya layanan administrasi perangkat daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	231.998.000	227.551.518	98,08%	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (12 Paket) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (12 Paket) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.740.000	36.094.000	95,64%	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (12 Paket) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (12 Paket) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

		1.3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	8.480.000	28,27%	Output : Jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan (12 Dokumen) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan (12 Dokumen) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.3.4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan	30.000.000	25.0880.000	83,60%	Output : Jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan (12 Dokumen) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah dokumen dan bahan bacaan perundangundangan yang di sediakan (12 Dokumen) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.280.000	238.459.732	98,07%	Output : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.113.788.928	1.064.414.303	95,57%	Output : Tersedianya penunjang urusan pemeintah daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Tersedianya penunjang urusan pemeintah daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.088.928	217.007.023	81,86%	Output : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	848.700.000	847.407.280	99,85%	Output : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan (12 Laporan) Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

		1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.440.000	408.580.473	93,62%	Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	217.770.000	204.974.400	94,12%	Output : Jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 34 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 34 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.670.000	181.105.873	95,99%	Output : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi sebanyak 1 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi sebanyak 1 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
		1.5.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	22.500.200	75.00%	Output : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 12 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Output : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 12 unit Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

URUSAN PENANAMAN MODAL								
2	Penanaman Modal	2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100.000.000	100.000.000	100%		
		2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100%	Output : Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan pameran (10 pelaku usaha)	Output : Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan pameran (10 pelaku usaha)
							Outcome : Meningkatnya investasi daerah	Outcome : Meningkatnya investasi daerah
		2.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100%	Output : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (10 Pelaku Usaha)	Output : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (10 Pelaku Usaha)
							Outcome : Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	Outcome : Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal
		3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	227.400.000	224.790.418	98,85%		
		2.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	227.400.000	224.790.418	98,85%	Output : Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu 3500 izn	Output : Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu 42175 izn
							Outcome : Meningkatnya pelayanan perizinan	Outcome : Meningkatnya pelayanan perizinan
		2.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	227.400.000	224.790.418	98,85%	Output : Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Layanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 3500 NIB	Output : Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Layanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 42175 NIB
							Outcome : Terpenuhinya pelayanan perizinan	Outcome : Terpenuhinya pelayanan perizinan

URUSAN TENAGA KERJA								
3	Kesempatan Kerja	4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.455.724.633	1.340.377.681	92,08%		
		1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.455.724.633	1.340.377.681	92,08%	Output : Jumlah pencari kerja yang dilatih	Output : Jumlah pencari kerja yang dilatih
							Outcome : Meningkatnya keterampilan pelatihan kerja yang kompeten	Outcome : Meningkatnya keterampilan pelatihan kerja yang kompeten
		1.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.305.724.633	1.192.935.255	91,36%	Output : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (208 orang)	Output : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (208 orang)
							Outcome : Terlatihnya masyarakat di lingkungan Kabupaten Tasikmlaya melalui pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)	Outcome : Terlatihnya masyarakat di lingkungan Kabupaten Tasikmlaya melalui pelatihan keterampilan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan di tempat (MTU)
		1.1.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	150.000.000	147.442.426	98,29%	Output : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (2 jenis)	Output : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (2 jenis)
							Outcome : Tersedianya sarana prasarana pelatihan kerja	Outcome : Tersedianya sarana prasarana pelatihan kerja
		5	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	213.649.000	173.292.508	81,11%		
		2.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	213.649.000	173.292.508	81,11%	Output : Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK1) (12 bulan)	Output : Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK1) (12 bulan)
							Outcome : Tersedianya pelayanan antarkerja	Outcome : Tersedianya pelayanan antarkerja

		2.1.1	Pelayanan antar Kerja	213.649.000	173.292.508	81,11%	Output : jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (3377 orang)	Output : jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (3824 orang)
							Outcome : Terlayannya pelayanan AK 1	Outcome : Terlayannya pelayanan AK 1
4	Perlindungan tenaga kerja	6	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	175.000.000	167.710.000	95,83%		
		3.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	167.710.000	99,81%	Output : Persentase kasus HI yang diselesaikan (100%)	Output : Persentase kasus HI yang diselesaikan (100%)
							Outcome : terselesaikannya permasalahan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Outcome : Terselesaikannya permasalahan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
		3.1.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	45.935.000	91,87%	Output : jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan (1 perkara)	Output : jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan (1 perkara)
							Outcome : Terselenggaranya dan terfasilitasinya peringatan hari buruh	Outcome : Terselenggaranya dan terfasilitasinya peringatan hari buruh
		3.1.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	121.775.000	97,42%	Output : jumlah LKS tripartit yang di bina (1 Lembaga)	Output : jumlah LKS tripartit yang di bina (1 Lembaga)
							Outcome : Terbangunnya kerjasama tripartit daerah	Outcome : Terbangunnya kerjasama tripartit daerah

		7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	20.000.000	20.000.000	100%		
		8.1	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	20.000.000	20.000.000	100%	Output : Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	Output : Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan
							Outcome : Meningkatnya kawasan transmigrasi	Outcome : Meningkatnya kawasan transmigrasi
		8.1.1	Penguatan Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satauan Pemukiman	20.000.000	20.000.000	100%	Output : Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	Output : Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan
							Outcome : Tersedianya sarana prasarana transmigrasi	Outcome : Tersedianya sarana prasarana transmigrasi

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya yang telah dicapai.

Pada tahun 2025, DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama, sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja DPMPTSPK Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian IKU
1	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	76,80 (poin)	82,83 (poin)	107,85 %
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. (juta) 228.279	Rp. (juta) 547.935	240,03 %
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	89,02 (poin)	86,67 (poin)	97,36 %
4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	50,15%	51,40%	102,50 %
5	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	15,41%	22,26%	144,45 %

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di simpulkan bahwa realisasi pada indikator kinerja utama semua tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan justru mengalami kenaikan.

Terlepas dari tercapainya seluruh indikator kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025, masih banyak tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Penguatan lembaga, peningkatan kualitas sumber daya aparatur DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perizinan secara elektronik, pengendalian pelaksanaan penanaman modal akan menjadi prioritas di tahun yang akan datang dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Tasikmalaya, Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
NIP. 19710409 200212 1 005